

**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
MENINGKATKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Dera Safira

NPP. 30.0332

Asdaf Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Studi Keuangan Publik

E-mail: dera0303@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Alm. Bapak Dr. Indra Baskoro, M.Si. dan Bapak Dr. Drs. H.
Maisondra, SH., MH., M.Pd., Dipl.Ed., M.A.P.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The increasing demand for development impacts government spending, which tends to continue to increase, even though, in general, what is happening is not balanced with government revenue. The author concludes that it is necessary to optimize local revenue to contribute to the APBD to support the success of development implementation, service improvement, and community welfare improvement. **Purpose:** This study aims to determine the contribution of Local Own Revenue to the district of Ogan Komering Ilir, to find out what factors hinder the optimization of Local Own Revenue in Ogan Komering Ilir Regency, and to find out the local government's efforts to increase Local Own Revenue. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. As for the data collection using observation techniques, interviews, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the management of Ogan Komering Ilir District Own Revenue has not been optimal. It can happen because there is a discrepancy between the budget and the realization. The existence of various kinds of obstacles that have not been resolved is a challenge for the government to overcome them. **Conclusion:** There are*

multiple kinds of blocks in the form of lack of order in the process of collecting and depositing regional taxes and fees, inadequate infrastructure, quality and quantity of human resources that are not optimal, regulations that are not strict enough, and lack of outreach to the community must be immediately addressed by the government, one of the ways is to strengthen the bureaucracy through cooperation with various parties. Thus it is expected that the management of Ogan Komering Ilir District Own Revenue can run optimally.

Keywords: Optimization, PAD, APBD.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Semakin besarnya tuntutan pembangunan memberikan dampak pada pengeluaran pemerintah yang cenderung terus meningkat, meskipun pada umumnya yang terjadi tidak seimbang dengan pendapatan pemerintah. Penulis menyimpulkan bahwa perlunya upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai bentuk kontribusi dalam APBD untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yakni pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir belum optimal. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasinya. Adanya berbagai macam kendala yang belum terpecahkan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengatasinya. **Kesimpulan:** Adanya berbagai macam kendala berupa kurang tetrieb dalam proses pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah, prasarana yang kurang memadai, kualitas

dan kuantitas SDM yang belum maksimal, regulasi yang kurang tegas, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat harus segera ditangani oleh pemerintah, salah satu caranya yaitu memperkuat birokrasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan demikian diharapkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat berjalan dengan optimal.

Kata kunci: Optimalisasi, PAD, APBD.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga dalam praktiknya, proses pembangunan ekonomi harus dilakukan secara bersamaan dengan pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi daerah yang tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan kemiskinan daerah. Begitupun pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan pemerataan ekonomi akan membuat kesenjangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah, dan biasanya hal tersebut masih sering terjadi di negara-negara berkembang. Kenyataan yang terjadi secara umum, kebijakan yang dijalankan lebih terpacu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh dengan pemerataan ekonomi dengan sendirinya, atau sering disebut dengan *trickle down effect*.

Adanya kebijakan otonomi tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaannya memerlukan dana yang memadai. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah otonom diharapkan dapat mengembangkan serta mengoptimalkan potensi dari daerah masing-masing yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan

kesejahteraan serta menjaga dan memelihara ketentraman ataupun ketertiban masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (Keuangan, 2020). PAD memiliki peran penting sebagai alat ukur kemampuan daerah dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan berbagai program pembangunannya. Pelaksanaan otonomi daerah memacu daerah untuk dapat mencari sumber-sumber penerimaan yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri sehingga dapat mendukung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintan di daerah, bahkan pelayanan kepada masyarakat sebagai mana perwujudan asas desentralisasi.

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, pendapatan daerah memegang peranan sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk jangka panjang, Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat.

Melalui penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu problematika yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan APBD yakni besarnya tuntutan pembangunan yang tidak diimbangi dengan jumlah pendapatan pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dilaksanakannya penelitian ini terinspirasi dari penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian dari Nirwana (2019) “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Anggaran dan Belanja Daerah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa optimalisasi PAD dalam meningkatkan APBD, di mana nampak adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Pelayanan dalam bidang kemasyarakatan, pemerintahan, pembangunan, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam APBD, besarnya sumber pendapatan belanja daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dapat mencerminkan kemandirian bagi pemerintahan daerah, dan sekaligus dapat mengurangi ketergantungan atau bantuan dari pemerintah pusat. Kemudian penelitian dari Dinda Dewi Ike Lestari (2022) “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan” yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota sudah berjalan tetapi belum optimal. Adapun faktor penghambat dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut terjadi karena adanya beberapa kendala yang dijumpai. Namun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sudah mengupayakan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun penelitian yang terakhir yaitu dari Sahrudin (2020) berjudul “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat”. Temuannya menunjukkan bahwa perkembangan penerimaa PAD pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 102.72%, dan tingkat kemandirian diukur berdasarkan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 37.80%, termasuk dalam pola konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukkan kinerja keuangan positif.

Menilik penelitian-penelitian terdahulu, penulis menjadikannya sebagai acuan dan perbandingan dalam melaksanakan penelitian mengenai topik di atas. Penulis juga tidak menjumpai penelitian dengan judul yang penulis gunakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana konteks penulisan yang dilakukan lebih terfokus kepada optimalisasi PAD dalam meningkatkan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan teori optimalisasi PAD Firdausy (2017).

1.5. Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. METODE

Terkait penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif mengharuskan penulis terjun langsung ke lapangan karena berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah atau bersifat naturalistik dan mendasar. Menggambarkan langsung kegiatan maupun peristiwa di lapangan atau yang diaporkan merupakan pengertian deskriptif kualitatif (Patton, 2006). Sebagaimana yang disampaikan oleh (Creswell, 2013) bahwasannya dengan pendekatan kualitatif, penulis harus mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna yang diperoleh dari sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berangkat dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sehingga, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan secara umum faktor penghambat yang ada di lapangan serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengoptimalan PAD di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Adapun pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. Sementara sumber data sekunder didapatkan melalui bukti, tulisan, maupun gambar dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik analisis (Miles dan Huberman, 1984) yang meliputi reduksi data, penyajian data, kemudian diakhiri dengan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hal ini bertujuan supaya kesimpulan akhir yang didapatkan mengenai optimalisasi PAD dalam meningkatkan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir benar-benar teruji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi PAD dalam meningkatkan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan teori optimalisasi PAD Firdausy (2017) yang menyatakan bahwa optimalisasi dapat dilakukan melalui 4 tahap, diantaranya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, penerapan struktur administratif, peningkatan skill staff, dan penyuluhan atau sosialisasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir

3.1.1. Kondisi PAD 3 Tahun terakhir

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Ir.H. Mun'im, MM menjelaskan bahwa tingkat Pendapatan asli daerah selama 3 tahun terakhir ditinjau dari komponen PAD sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Mayoritas kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir masih beada di bawah rata-rata. Apalagi dalam kurun tahun 2020-2022 yang tengah dilanda pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir semakin memburuk.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	57.332.000.000,00	60.073.277.575,00
2021	171.700.435.349,00	65.777.983.997,00
2022	146.457.428.261,00	86.156.323.608,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa memang dalam kuartal tahun 2020-2022, pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih jauh dari target yang ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah sebagai wajib pajak belum bisa dikatakan mencukupi.

2. Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penyelenggaraan retribusi daerah masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya, serta kemampuan pemerintah daerah untuk memahami target dan realisasi anggaran berkaitan dengan retribusi daerah.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020-2022

TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
2020	4.354.000.000,00	5.009.587.865,75
2021	15.703.360.000,00	4.483.416.705,00
2022	8.049.600.000,00	9.387.006.814,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Pendapatan retribusi pada tahun 2020 dan 2022 telah mencapai target yang ditentukan, tetapi pada tahun 2021 terjadinya penurunan dengan target Rp.15.703.360.000,00 dengan penyelenggaraan realisasinya hanya sebesar Rp. 4.483.416.705,00. Adanya ketidak stabilan terhadap penerimaan retribusi daerah menyebabkan menyebabkan target maupun realisasi retribusi mengalami naik turun. Bahkan hal ini juga dipengaruhi adanya covid-19 selama 3 tahun terakhir.

3. Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah

Selama tiga tahun terakhir, pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dapat dikatakan memenuhi target dikarenakan pada tahun 2020 target sebesar Rp.8.011.795.156,00 sudah terealisasikan sebesar Rp.8.709.040.441,19 selanjutnya diikuti pada tahun 2021 dimana anggaran ditetapkan sebesar Rp.8.709.040.441,00 sudah terealisasikan sebesar Rp.9.671.570.384,21. Tahun 2022 anggaran ditetapkan sebesar Rp.10.560.778.438,00 namun realisasinya mencapai Rp.10.568.778.437,67 hal ini cukup baik dimana pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	8.011.795.156,00	8.709.040.441,19
2021	8.709.040.441,00	9.671.570.384,21
2022	10.560.778.438,00	10.568.778.437,67

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sudah terlaksana dengan baik walaupun pada 3 tahun terakhir ini terjadi pandemi covid-19.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	251.219.394.210,00	94.989.865.438,00
2021	417.968.492.529,00	76.803.645.011,99
2022	341.668.109.148,00	87.587.529.810,61

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas, pada saat tiga tahun terakhir, lain-lain PAD yang Sah cukup terlaksana dengan baik, meskipun dilihat dari tahun 2020 hingga 2022 pada komponen lain-lain PAD yang sah belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan realisasi dari Rp.94.989.865.438,00 menjadi Rp.76.803.645.011,99. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali walaupun tidak sebesar pada tahun 2020 yaitu Rp.87.587.529.810,61.

3.1.2. Kondisi Struktur Birokrasi

Kondisi Struktur Birokrasi Badan Pengeolaan Keuangan dan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri belum baik. Adanya kekurangan atau kekosongan jabatan dapat mempengaruhi kualitas birokrasi yang akan berdampak pada tingkat pendapatan asli daerah. Salah satu contoh nya kekosongan jabatan fungsional pada bidang Perbendaharaan dan Bidang Akutansi dan petugas pemungutan pajak daerah yang masih kurang jumlahnya. Melihat bagaimana kondisi yang sedang terjadi sekarang, hambatan ini harus segera ditangani. Kadang kala, permasalahan besar yang terjadi dalam suatu sistem bukan berasal dari faktor luar atau eksternal melainkan dari dalam sendiri atau internal.

3.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pada dasarnya, Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun demikian, terdapat berbagai masalah yang ditemukan melalui penelitian ini yang kemudian memiliki pengaruh tersendiri terhadap optimalisasi PAD. Permasalahan mendasar yang kemudian menjadi faktor penghambat, diantaranya:

1. Anggaran

Kondisi anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terbilang masih membutuhkan banyak perhatian. Salah satu penentu tidak tercapainya optimalisasi penerimaan terjadi karena adanya kebocoran. Dimaksud dengan kebocoran tersebut adalah kurang tertib dalam proses pemungutan dan enyeteran pajak dan retribusi daerah.

2. Prasarana yang kurang memadai

Pentingnya prasarana penunjang pelaksanaan pemungutan atau penerimaan PAD dikarenakan jika kantor sudah memiliki pegawai yang baik namun dengan kurangnya prasarana yang memadai maka akan memberikan hasil yang kurang maksimal. Dibutuhkannya prasarana yang baik untuk menunjang kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 3.5
Jumlah dan Keadaan Pra Sarana BPKAD Kabupaten OKI

No	Nama Barang	Jumlah	Rusak
1.	Motor	50	2
2.	Mobil	6	1
3.	Mesin Hitung	15	4
4.	Mesin Fotocopy	4	1
5.	Komputer	120	30
6.	Printer	135	37

Sumber: Daftar KIB B BPKAD Kabupaten OKI Tahun 2023

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Prasarana pada Kantor BPKAD Kabupaten OKI telah mengalami banyaknya kerusakan. Kerusakan yang terjadi

bukan hanya pada beberapa barang tetapi hampir seluruh komponen prasarana barang yang dimiliki BPKAD. Dampak dari kekurangan tersebut terjadi pada pelaksanaan peningkatan PAD dan mengambat pegawai dalam melakukan pekerjaannya.

3. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai

Tabel 3.6
Jumlah SDM Pada BPKAD Kabupaten OKI

NO	Jenis Pegawai	Jumlah	Kebutuhan
1.	Tenaga PNS	43 orang	55 orang
2.	Tenaga Honorer	18 orang	25 orang
	TOTAL	61 orang	80 orang

Sumber: BPKAD Kabupaten OKI

Melalui data di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih memiliki berbagai kekurangan dari segi jumlah atau kuantitas. Kekurangan jumlah pegawai tersebut kemudian tidak diikuti dengan bagaimana sertifikasi pegawai yang sudah ada sebelumnya. Sehingga paling tidak diperlukan langkah perekrutan atau mutasi dari instansi lain sehingga kedudukan jabatan kosong dapat terisi. Kekurangan ini kemudian akan berdampak pada kinerja pegawai dengan melihat bagaimana pekerjaan yang dikhawatirkan akan mengalami penumpukan. Lebih lanjut, Ibu Nurbaiti mengutarakan bahwasanya kualitas Sumber Daya Manusia di BPKAD harus ditingkatkan dengan berbagai strategi yang dipersiapkan.

4. Kondisi birokrasi

Adanya kekosongan jabatan dan tingginya angka kebutuhan pegawai dapat mempengaruhi struktur birokrasi BPKAD. Hal ini berkaitan dengan bagaimana BPKAD sebagai instansi yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang menangani bidang keuangan di Kabupaten OKI. Apabila didapati birokrasi tidak

memiliki kualitas yang memadai maka dimungkinkan optimalisasi yang diharapkan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (Umasugi et al., 2017).

5. Kurangnya sosialisasi

Banyak permasalahan yang datang justru dikarenakan kurangnya pengetahuan dan minimnya edukasi mengenai anggaran daerah. Banyak masyarakat yang belum paham mengenai bagaimana anggaran daerah mampu membantu mereka semakin produktif. Kadangkala terjadi perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat dikarenakan permasalahan ketidaktahuan masyarakat akan suatu informasi. Sementara itu, dorongan pemerintah terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi masih terbilang minim.

3.3. Upaya BPKAD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan beberapa faktor yang dilandasi oleh dimensi dan indikator yang telah dibuat berdasarkan teori yang diangkat penulis, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:

1. Memperbaiki struktur birokrasi yang belum tepat

Upaya ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi struktur organisasi. Upaya memperbaiki kekurangan dari hasil identifikasi tersebut sebagaimana yang terjadi di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu menyusun serta menempatkan pegawai sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang sesuai serta diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM-nya.

2. Memperkuat birokrasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak

Langkah ini dilakukan melalui penjalinan hubungan kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk pemenuhan kuantitas SDM dan melaksanakan perekrutan pegawai sesuai dengan pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang baik sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan dapat memberikan kualitas pekerjaan yang baik.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM

Upaya ini dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan peningkatan skill staff dan melakukan perekrutan pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan.

4. Meningkatkan pengawasan yang kurang maksimal

Pengawasan terhadap wajib pajak terus dilaksanakan untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Adapun upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten OKI antara lain penggunaan perangkat *Tapping Box*, pembentukan tim satgas pendapatan, serta melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten OKI.

5. Upaya mengatasi kurangnya prasarana

Beberapa hal yang dilakukan BPKAD sebagai bentuk upaya dapat dilakukan dimulai dari pendataan prasarana secara berulang, menyeluruh dan real. Data tersebut akan menjadi catatan untuk selanjutnya dilakukan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan inventaris dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan serta melakukan pemeliharaan prasarana kantor secara berkala.

6. Melakukan sosialisasi

Adapun upaya penting yang dilakukan untuk optimalisasi PAD yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak. Selain itu, BPKAD Kabupaten OKI juga menerapkan sistem *reward and punishment* kepada wajib pajak, supaya menumbuhkan rasa kesadaran dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

3.4. Diskusi Utama Penelitian

Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh penulis selama kegiatan penelitian serta hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir belum Optimal. Terdapat sejumlah persoalan yang menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi PAD, diantaranya kurangnya penerimaan anggaran, prasarana yang kurang memadai, kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai, kondisi birokrasi yang masih labil, dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak. Permasalahan-permasalahan yang kemudian menjadi faktor penghambat optimalisasi PAD ini kemudian akan diselesaikan melalui upaya yang dilakukan oleh BPKAD sebagai instansi penanggung jawab keuangan daerah antara lain memperbaiki struktur birokrasi

yang belum tepat, memperkuat birokrasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, meningkatkan pengawasan yang kurang maksimal, manajemen pada prasarana, serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Tentunya hal ini bukan perkara mudah mengingat faktor yang dipaparkan sebelumnya merupakan kondisi riil Kabupaten OKI yang harus segera diselesaikan. Adapun pemerintah sendiri telah melakukan berbagai persiapan dan upaya untuk menyelesaikan dan menuntaskan berbagai penghambat di atas. Upaya tersebut akan diselesaikan secara terstruktur dan berkala. Lebih lanjut, pemerintah Ogan Komering Ilir juga mengharapkan partisipasi dari berbagai pihak baik kepegawaian maupun masyarakat sehingga dapat bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan pendapatan daerah dengan berpartisipasi melalui bidangnya masing-masing, seperti bekerja dengan maksimal dan membayar pajak. Hasilnya, problematika yang dihadapi dapat terselesaikan dan Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dengan optimal.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat optimalisasi PAD dalam meningkatkan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu kurangnya penerimaan anggaran, prasarana yang kurang memadai, kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai, kondisi birokrasi yang masih labil, dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, penulis melakukan kodifikasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2023 hingga 2 Februari 2023 maka peneliti menarik kesimpulan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan teori optimalisasi PAD

Firdausy (2017) masih belum optimal. Adapun faktor penghambat yang dijumpai diantaranya kurangnya penerimaan anggaran, prasarana yang kurang memadai, kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai, kondisi birokrasi yang masih labil, dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak. Meskipun dijumpai berbagai macam kendala, pemerintah tetap mengupayakan untuk mengatasi segala hal yang menjadi penghalang dalam kegiatan optimalisasi PAD dalam rangka meningkatkan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu serta kondisi yang terjadi di lapangan. Informasi atau data yang didapatkan dari informan belum cukup untuk dijadikan rujukan dalam langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap bagi peneliti berikutnya supaya dapat lebih memfokuskan arah penelitian. Sehingga dapat menyempurnakan penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan penelitian ini, khususnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta jajarannya, yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_dan_Strategi_Peningkatan_Penda/Q6ZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1%0Ahttps://berkas.dpnr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-74.pdf.

- Keuangan, D. J. P. (2020). Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah?
https://djpk.kemenkeu.go.id/?epkb_post_type_1=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah.
- Lestari, D. D. I. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (1984). Analisis Data Kualitatif.
- Nirwana. (2019). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar). Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Patton, Michael Quinn. (2006). Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sahrudin, S. (2020). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 10(2), 150-156.

